

## ***LIFE SKILLS* DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**

**Marwanti**

### **A. Pendahuluan**

Upaya peningkatan mutu pendidikan selalu dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta seperti melalui penyempurnaan kurikulum, pengadaan buku ajar, peningkatan mutu guru, peningkatan manajemen pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru. Namun demikian berbagai indikator menunjukkan bahwa mutu pendidikan belum meningkat secara signifikan. Berbagai temuan tentang rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia telah dikemukakan di beberapa forum maupun media massa. Hasil survei Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index/HDI*) Indonesia menduduki peringkat 102 dari 106 negara Asia, Afrika dan nomor 12 dari 12 negara Asia di bawah Vietnam.

Apalagi jika dihadapkan pada tantangan kedepan dengan adanya kesepakatan perdagangan bebas AFTA dan AFLA telah bergulir dengan membawa konsekuensi membuka peluang masuknya tenaga kerja dari luar negeri yang berkualitas dan berdaya saing tinggi ke dalam dunia kerja di Indonesia. Hal ini jelas mengancam keberadaan tenaga kerja Indonesia, lebih-lebih bagi mereka yang tidak memiliki kecakapan hidup yang memadai untuk memasuki kesempatan kerja yang ada. Kenyataan ini mengimplikasikan bahwa keterbukaan negara dan masyarakat Indonesia terhadap berbagai aktifitas sosial, ekonomi, budaya, dan komunikasi, telah menuntut tersedianya modal sumber daya manusia berupa kecakapan hidup yang bermutu dan mampu bersaing dengan tenaga kerja asing.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah banyaknya siswa SLTP yang amat rentan dengan *droup out* karena kondisi ekonomi yang sulit dan banyak tamatan SLTP yang terpaksa harus menjadi penganggur karena tidak mendapatkan lapangan pekerjaan dan juga merasa kesulitan untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh di sekolah dalam kehidupan nyata. Menurut data dari Balitbang Diknas tahun 2000 terdapat 19,3% tamatan SD tidak melanjutkan ke SLTP. 34,4% tamatan SLTP yang tidak melanjutkan ke SLTA dan 53,12 tamatan SLTA yang tidak melanjutkan ke PT, sedangkan daya tampung PT sekitar 11,41%, dengan kata lain terdapat 88,6% tamatan SLTA yang harus ke dunia kerja (Bambang Sartono, 2003). Hal yang demikian menuntut dunia pendidikan melakukan intropeksi pada pola pembelajaran yang dikembangkan di sekolah karena selama ini pembelajaran yang dikembangkan di sekolah bersifat teoritis dan kurang

menyentuh pada kebutuhan anak untuk bekal hidup di masyarakat dan siswa seakan-akan asing dari lingkungan hidupnya.

Agar bangsa Indonesia dapat mengatasi kondisi akibat krisis yang juga belum berakhir maupun dalam rangka menghadapi persaingan pasar bebas dibutuhkan pendidikan yang dapat membekali pada anak didik berupa kecakapan hidup.

Masalah di atas masih ditambah lagi dengan fakta bahwa sebagian besar tamatan pendidikan dasar dan menengah umum tidak dapat terserap ke dalam dunia kerja. Faktor-faktor penyebabnya antara lain adalah: (1) jumlah angkatan kerja yang hanya tamatan pendidikan dasar dan menengah umum jauh lebih besar daripada kesempatan kerja yang ada, (2) angkatan kerja tamatan pendidikan dasar dan menengah umum kalah bersaing dengan angkatan kerja tamatan pendidikan menengah kejuruan dalam memasuki lapangan kerja, karena kecakapan yang mereka miliki sangat minim dan terbatas, (3) kecakapan hidup yang dibutuhkan oleh masyarakat luas khususnya dunia kerja yang ada di masyarakat tidak sesuai dengan kecakapan yang dimiliki tamatan pendidikan dasar dan menengah umum (Saryono, Djoko, 2002). Hal-hal tersebut menyebabkan para lulusan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia tidak memiliki keunggulan komparatif, apalagi keunggulan kompetitif.

Bertolak dari berbagai gambaran di atas, dapat dilihat bahwa ada permasalahan besar dan mendasar dengan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, yaitu rendahnya mutu sistem pembelajaran atau sistem pendidikan di sekolah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengembangan sistem pendidikan yang dalam hal ini pengembangan kurikulum yang mampu mengatasi persoalan-persoalan tersebut.

## **B. *Life Skills* (Kecakapan Hidup)**

Menurut Indrajati Sidi (2002), kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mampu menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Dalam pandangan Slamet PH (2002), kecakapan hidup adalah pendidikan kemampuan, kesanggupan dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan dengan nikmat dan bahagia. Sedangkan Brolin (1989) mengemukakan bahwa kecakapan hidup merupakan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan oleh seseorang untuk berfungsi dan bertindak secara mandiri dan otonom dalam kehidupan sehari-hari, tidak harus selalu meminta bantuan dan petunjuk pihak lain.

Ini berarti bahwa bentuk kecakapan hidup berupa pengetahuan sebagai praksis dan kiat (*praxis* dan *techne*), bukan teori; pengetahuan sebagai *skills of doing* sekaligus *skills of being*.

Pendidikan berjalan pada setiap saat dan pada segala tempat. Setiap orang dari kanak-kanak hingga tua mengalami proses pendidikan melalui apa yang dijumpai atau apa yang dikerjakan. Walaupun tidak ada pendidikan yang sengaja diberikan, secara alamiah setiap orang akan terus belajar dari lingkungannya. Pendidikan diartikan sebagai proses perolehan pengalaman belajar yang berguna bagi peserta didik. Apabila dikaitkan dengan *life skills* maka pendidikan sebagai sistem yang pada dasarnya merupakan sistematisasi dari proses perolehan pengalaman. Oleh karena secara filosofis pendidikan diartikan sebagai proses pengalaman belajar yang berguna bagi peserta didik. Pengalaman belajar tersebut diharapkan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik, sehingga siap digunakan untuk memecahkan problema dalam kehidupan yang dihadapi. Pengalaman yang diperoleh diharapkan dapat mengilhami mereka ketika menghadapi problema dalam kehidupan sesungguhnya.

Tahun 2001 Pemerintah Pusat, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional mengembangkan konsep Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skills Education*), yaitu suatu pendidikan yang dapat membekali peserta didik dengan kecakapan hidup, yaitu keberanian menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara kreatif menemukan solusi serta mampu mengatasinya. Pendidikan yang dapat mensinergikan berbagai mata pelajaran menjadi kecakapan hidup yang diperlukan seseorang, di manapun ia berada, bekerja atau tidak bekerja, apa pun profesinya. Dengan bekal kecakapan hidup tersebut, diharapkan para lulusan akan mampu memecahkan problema kehidupan yang dihadapi, termasuk mencari atau menciptakan pekerjaan bagi mereka yang tidak melanjutkan pendidikannya (Depdiknas, 2002). Kendall dan Marzano (1997) menegaskan bahwa kecakapan hidup (*life skills*) telah menjadi salah satu hal yang harus dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat, termasuk peserta didik, agar mereka mampu berperan aktif dalam lapangan kerja yang ada serta mampu berkembang.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Indrajati Sidi (2002) bahwa kecakapan hidup lebih luas dari keterampilan untuk bekerja, dan dapat dipilah menjadi lima, yaitu: (1) kecakapan mengenal diri (*self awarness*), yang juga disebut kemampuan personal (*personal skill*), (2) kecakapan berpikir rasional (*thinking skill*), (3) kecakapan sosial

(*social skill*), (4) kecakapan akademik (*academic skill*), dan (5) kecakapan vokasional (*vocational skill*).

Tiga kecakapan yang pertama dinamakan *General Life Skill (GLS)*, sedangkan dua kecakapan yang terakhir disebut *Specific Life Skill (SLS)*. Di alam kehidupan nyata, antara GLS dan SLS, antara kecakapan mengenal diri, kecakapan berpikir rasional, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan kecakapan vokasional tidak berfungsi secara terpisah-pisah, atau tidak terpisah secara eksklusif. Hal yang terjadi adalah peleburan kecakapan-kecakapan tersebut, sehingga menyatu menjadi sebuah tindakan individu yang melibatkan aspek fisik, mental, emosional dan intelektual. Derajat kualitas tindakan individu dalam banyak hal dipengaruhi oleh kualitas kematangan berbagai aspek pendukung tersebut di atas.

Tujuan pendidikan kecakapan hidup adalah memfungsikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu mengembangkan potensi manusiawi peserta didik untuk menghadapi perannya di masa datang. Secara khusus, pendidikan yang berorientasi kecakapan hidup bertujuan: (1) mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapi, (2) memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel, sesuai dengan prinsip pendidikan berbasis luas, dan (3) mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya di lingkungan sekolah, dengan memberikan peluang pemanfaatan sumberdaya yang ada di masyarakat, dengan prinsip manajemen berbasis sekolah (Indrajati Sidi, 2002).

Dari uraian di atas maka dapat disarikan bahwa kecakapan hidup (*life skills*) adalah kemampuan yang diperlukan untuk menempuh kehidupan dengan sukses, bahagia dan secara bermartabat, seperti kemampuan berfikir, berkomunikasi secara efektif, membangun kerjasama, melaksanakan peran sebagai warga negara yang bertanggungjawab dan kesiapan untuk terjun di dunia kerja.

### **C. Pengembangan Kurikulum**

Kebutuhan manusia akan selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian juga kurikulum di suatu negara pastilah mengalami perubahan yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Merupakan suatu realita bahwa di Indonesia pada setiap kurun waktu satu dekade kurikulum mengalami perubahan atau pergantian. Hal tersebut disebabkan kurikulum yang sudah berlaku dipandang tidak menghasilkan output yang belum berhasil dan memuaskan

sesuai dengan tuntutan jaman. Akan tetapi, jika diperhatikan secara cermat sebenarnya yang menyebabkan kurang berhasilnya suatu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum yang digunakan saja, faktor-faktor lain masih cukup banyak yang turut menentukan keberhasilan dan kualitas pendidikan, seperti guru sebagai pengajar, media yang digunakan dalam pembelajaran, motivasi siswa untuk berprestasi, lingkungan tempat siswa belajar, lingkungan keluarga dan sebagainya. Namun demikian kurikulumlah yang seringkali dipandang sebagai sebab kegagalan pendidikan kita, serta rendahnya kualitas hasil dan prestasi pendidikan kita.

Di Indonesia berdasarkan angka tahun pernah menerapkan berbagai jenis kurikulum yakni Kurikulum 1954, 1961, 1968, 1975, 1984 dan 1994. Untuk yang terakhir yaitu tahun 2004 mulai menerapkan kurikulum berbasis kompetensi.

Kurikulum 1954, 1961, 1968 menerapkan pendekatan materi pelajaran yaitu yang dipentingkan dalam kegiatan belajar mengajar adalah pemberian materi pelajaran sebanyak-banyaknya sehingga siswa memiliki pengetahuan yang banyak dan memadai, namun dalam hal keterampilan kurang mendapatkan perhatian. Kurikulum 1975 bertitik tolak dari pendekatan tujuan instruksional, baik umum maupun khusus. Dalam KBM yang penting adalah dicapainya target atau tujuan yang hendak dicapai, sementara materi untuk keperluan pencapaian tujuan pengajaran. Kurikulum 1984 diberlakukan untuk pencapaian tujuan lebih bersifat komprehensif jika dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, yakni meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotor sehingga pendidikan mampu memberikan kepada siswa hal-hal yang bersifat praktis-fungsional. Sedangkan kurikulum 1994 diberlakukan dengan menggunakan pendekatan tematik, yakni berupa tema-tema pembelajaran. Adapun kurikulum 2004 merupakan kurikulum yang di dalamnya memiliki berbagai aspek kompetensi minimal yang seharusnya dimiliki siswa.

Pendidikan kecakapan hidup bukanlah membentuk mata pelajaran-mata pelajaran baru, tetapi mensinergikan berbagai mata pelajaran menjadi kecakapan hidup yang diperlukan seseorang, di manapun ia berada, bekerja atau tidak bekerja, apapun profesinya. Ada tiga prinsip mendasar dalam pengembangan pendidikan kecakapan hidup, yaitu: (1) tidak mengubah sistem pendidikan yang berlaku saat ini, (2) tidak harus dengan mengubah kurikulum, sebab yang justru diperlukan adalah pensiasatan kurikulum untuk diorientasikan pada kecakapan hidup, dan (3) etika sosio religius bangsa dapat diintegrasikan dalam proses pendidikan. Bertolak dari ketiga prinsip tersebut, maka pengembangan kecakapan hidup tidak dalam bentuk mata pelajaran tersendiri, melainkan

diintegrasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran yang ada selama ini dengan prinsip-prinsip yang sama di atas.

Walaupun pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup dapat bervariasi disesuaikan dengan kondisi anak dan lingkungannya, namun memiliki prinsip-prinsip umum yang sama. Prinsip-prinsip umum yang khususnya terkait dengan kebijakan pendidikan di Indonesia, selain ketiga prinsip dasar di atas, juga meliputi: (1) pembelajaran menggunakan prinsip *learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together*, (2) pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS), (3) potensi wilayah sekitar sekolah dapat direfleksikan dalam penyelenggaraan pendidikan, sesuai dengan prinsip pendidikan kontekstual dan pendidikan berbasis luas (*broad based education*), (4) paradigma *learning to life and school to work* dapat dijadikan dasar kegiatan pendidikan, sehingga terjadi pertautan antara pendidikan dengan kebutuhan nyata peserta didik, dan (5) penyelenggaraan pendidikan senantiasa diarahkan agar peserta didik menuju hidup yang sehat dan berkualitas; mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang luas; serta memiliki akses untuk mampu memenuhi standar hidupnya secara layak (Depdiknas, 2002).

Relevan dengan pendapat di atas, prinsip umum implementasi pendidikan kecakapan hidup adalah meliputi: (1) tidak harus atau tidak perlu mengubah bangun – dasar atau sistem pendidikan nasional yang sekarang berlaku; ini mensyaratkan format dan model implementasi pendidikan kecakapan hidup yang fleksibel dan bervariasi, (2) tidak harus atau tidak perlu mengubah kurikulum formal dan ideal (normatif) yang sekarang berlaku, karena kurikulum operasional dapat disiasati sedemikian rupa guna mengimplementasikan pendidikan kecakapan hidup, (3) harus mengedepankan paradigma *learning for life and school to work* yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik; ini berarti membutuhkan suatu kajian kebutuhan-kebutuhan hidup dan kehidupan pada masa depan, (4) harus mengedepankan paradigma *learning from the people* atau kearifan masyarakat setempat yang berkenaan dengan kehidupan mereka; ini memerlukan inventori kemampuan, kemauan, dan pengetahuan masyarakat setempat dalam mempertahankan, menjalani, dan mengembangkan hidup dan kehidupan, (5) harus mengutamakan paradigma pendidikan berbasis komunitas atau pendidikan masyarakat luas (*community based learning* atau *broad based education*).

#### **D. Implementasi Kecakapan Hidup Dalam Kurikulum**

Implementasi pendidikan kecakapan hidup dapat mempertimbangkan beberapa model, antara lain adalah: (1) model integratif, (2) model komplementatif, dan (3) model diskrit (Saryono, Djoko: 2002). Dalam model integratif, implementasi pendidikan kecakapan hidup melekat dan terpadu dalam program-program kurikuler, kurikulum yang ada, dan atau mata pelajaran yang ada. Berbagai program kurikuler dan mata pelajaran yang ada seharusnya bermuatan atau berisi kecakapan hidup. Model ini memerlukan kesiapan dan kemampuan tinggi dari sekolah, kepala sekolah, dan guru mata pelajaran. Kepala sekolah dan guru harus pandai dan cekatan menyiasati dan menjabarkan kurikulum, mengelola pembelajaran, dan mengembangkan penilaian. Ini berarti, mereka harus kreatif, penuh inisiatif, dan kaya gagasan. Keuntungannya, model ini relatif murah, tidak membutuhkan ongkos mahal, dan tidak menambah beban sekolah terutama kepala sekolah, guru, dan peserta didik.

Dalam model komplementatif, implementasi pendidikan kecakapan hidup dimasukkan dan atau ditambahkan ke dalam program pendidikan kurikuler dan struktur kurikulum yang ada; bukan mata pelajaran. Pelaksanaannya bisa berupa menambahkan mata pelajaran kecakapan hidup dalam struktur kurikulum atau menyelenggarakan program kecakapan hidup dalam kalender pendidikan. Model ini tentu saja membutuhkan waktu tersendiri, guru tersendiri di bidang kecakapan hidup, dan ongkos yang relatif besar. Selain itu, penggunaan model ini dapat menambah beban tugas siswa dan guru selain beban finansial sekolah. Meskipun demikian, model ini dapat digunakan secara optimal dan intensif untuk membentuk kecakapan hidup pada peserta didik.

Dalam model diskrit, implementasi pendidikan kecakapan hidup dipisahkan dan dilepaskan dari program-program kurikuler, kurikulum reguler, dan atau mata pelajaran (pembelajaran kurikuler). Pelaksanaannya dapat berupa pengembangan program kecakapan hidup yang dikemas dan disajikan secara khusus kepada peserta didik. Penyajiannya bisa terkait dengan program kokurikuler atau bisa juga berbentuk program ekstrakurikuler. Model ini membutuhkan persiapan yang matang, ongkos yang relatif besar, dan kesiapan sekolah yang baik. Selain itu, model ini memerlukan perencanaan yang baik agar tidak salah penerapan. Meskipun demikian, model ini dapat digunakan membentuk kecakapan hidup peserta didik secara komprehensif dan leluasa.

Menurut Parjono (2002) model penyelenggaraan pendidikan *life skills* di sekolah dibagi menurut jenjang sekolah sebagai berikut:

1. Untuk peserta didik tingkat SD dan SLTP dilakukan dengan mengintegrasikan paket-paket diklat pravokasional melalui reorganisasi materi pembelajaran dan penetapan bahan ajar minimal agar dapat menguasai *general life skills*. Program ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas tentang dunia kerja dan karir, sehingga kalau akan memilih sekolah selanjutnya sudah memiliki pilihan yang tepat.
2. Bagi peserta didik SMU ditawarkan paket-paket diklat yang diperlukan masyarakat melalui reorganisasi materi pembelajaran dan menetapkan bahan ajar minimal agar dapat menguasai *general life skills*. Selain itu juga ditawarkan program kecakapan vokasional (*vocational skills*) yang akan memberikan bekal kepada mereka untuk dapat bekerja atau menciptakan pekerjaan sendiri setelah selesai sekolah. Sementara untuk peserta didik SMK kecakapan vokasional telah menjadi isi kurikulum, sehingga mereka perlu kecakapan generik dan kecakapan akademik.

Model manapun yang dipilih, yang penting adalah bahwa pembelajaran kecakapan hidup tersebut pada hakekatnya adalah pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pelaku belajar. Siswa mempunyai kesempatan untuk belajar aktif, baik mental maupun fisik, dan hal ini dapat diperoleh bila lingkungan belajar dibuat menyenangkan bagi siswa.

Model pembelajaran yang dimaksud adalah model pembelajaran aktif. Model pembelajaran aktif merupakan model pembelajaran yang membuat siswa melakukan perbuatan untuk beroleh pengalaman, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Siswa akan belajar banyak melalui perbuatan beroleh pengalaman langsung. Dengan berbuat, siswa mengaktifkan lebih banyak indera daripada hanya melalui mendengarkan. Selanjutnya kecakapan interaksi akan dimiliki oleh siswa bila pelajaran berlangsung dalam suasana interaksi dengan orang lain, misalnya berdiskusi dan tanya-jawab. Sedangkan kecakapan komunikasi merupakan kecakapan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan, baik secara lisan maupun tulisan, dan hal ini menjadi kebutuhan setiap manusia dalam rangka mengungkapkan dirinya untuk mencapai kepuasan. Kemudian bila seseorang mengungkapkan gagasannya kepada orang lain dan mendapat tanggapan maka orang itu akan merenungkan kembali gagasannya, kemudian melakukan perbaikan, sehingga memiliki gagasan yang lebih mantap. Inilah yang dimaksud refleksi. Refleksi ini dapat terjadi sebagai akibat dari interaksi dan komunikasi.

Pembelajaran *life skills* telah diterapkan di beberapa negara maju seperti halnya

di Amerika, Jerman dan Inggris yang telah mulai sekitar tahun 1980 . Proses pembelajaran yang memberi motivasi agar siswa aktif, mampu memecahkan permasalahan, pembelajaran yang konkrit, referensi tidak selalu berupa buku tetapi juga kehidupan nyata.

Temuan dari Tim Peneliti Universitas Negeri Malang (2002) mengenai faktor-faktor penghambat pendidikan kecakapan hidup di Jawa Timur menunjukkan bahwa faktor internal yang berasal dari guru, sistem sekolah, kurikulum, serta fasilitas yang dimiliki sekolah merupakan faktor penghambat yang utama. Faktor penghambat yang lain juga termasuk faktor eksternal yang berasal dari dukungan pemerintah, sosial/budaya, dukungan dunia usaha/industri, dan dukungan orang tua. Hasil penelitian itu juga menjelaskan bahwa menurut peringkatnya, guru menduduki peringkat pertama sebagai penghambat, disusul berturut-turut oleh sistem sekolah, kurikulum, fasilitas, dukungan pemerintah, dukungan dunia usaha/industri, orang tua, dan sosial budaya.

Faktor penghambat dari guru meliputi guru kurang mengerti pendidikan kecakapan hidup, kurang profesional dalam mengajar, tidak mempunyai keterampilan khusus, gaji rendah, motivasi untuk berkembang rendah, dan kurang tekun dalam mengembangkan diri. Faktor penghambat sistem sekolah meliputi sistem yang sering berubah-ubah, tidak mendukung pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup, kurang terpadu antar jenjang, dan kurang waktu dalam pembinaan keterampilan siswa.

Selanjutnya faktor penghambat kurikulum meliputi terlalu sarat materi, kurang sesuai dengan aset unggulan daerah, masih seragam terpusat, tidak mengarah kepada pendidikan kecakapan hidup serta mengabaikan minat dan bakat siswa. Faktor penghambat dari sisi fasilitas meliputi fasilitas kurang memadai, fasilitas yang ada kurang mendukung pendidikan kecakapan hidup, dan fasilitas tidak merata antara sekolah meskipun untuk jenjang sekolah yang sama.

Sementara itu faktor penghambat dukungan pemerintah meliputi bantuan dana tidak merata, relatif kecil, nara sumber ahli pendidikan kecakapan hidup sedikit, bantuan yang ada kurang mendukung pelaksanaan program pendidikan kecakapan hidup. Sedangkan faktor penghambat dukungan dunia industri adalah meliputi keterbatasan jumlah serta sumber daya dunia usaha/industri di daerah, merasa tidak mempunyai ikatan, tidak ada akad kerja sama yang jelas, alokasi waktu sekolah dengan dunia usaha/industri yang tidak seiring dan tidak ada koordinasi. Kemudian mengenai faktor penghambat sosial/budaya adalah meliputi tatanan sosial/budaya yang tidak mendukung siswa sekolah bekerja, tidak memahami pendidikan kecakapan hidup, serta masih berorientasi pada

perolehan gelar sesudah selesai sekolah. Penghambat dari orang tua meliputi kebanyakan berpendapatan rendah sedangkan yang berpendapatan tinggi kurang sadar, tidak mengerti pendidikan kecakapan hidup, pola pikir berorientasi pada gelar kesarjanaaan, dan motivasi untuk mendorong anak memperoleh kecakapan hidup rendah.

Jelaslah bahwa banyak faktor penghambat yang sangat mungkin dihadapi oleh sekolah dalam rangka implementasi pendidikan kecakapan hidup, baik itu faktor internal dari sekolah sendiri maupun faktor eksternal. Memperhatikan kendala-kendala tersebut, maka di dalam implementasi pendidikan kecakapan hidup di sekolah, tahap awal yang harus dilakukan adalah memberikan pengertian dan pemahaman kepada pelaksana sekolah (terutama guru dan kepala sekolah) mengenai pendidikan kecakapan hidup itu sendiri. Hal ini penting karena berdasarkan temuan di atas, ternyata faktor guru merupakan salah satu penghambat utama, yang antara lain karena guru kurang mengerti pendidikan kecakapan hidup, kurang profesional dalam mengajar, tidak mempunyai keterampilan khusus, dan kurang tekun dalam mengembangkan diri. Implementasi pendidikan kecakapan hidup di sekolah, tidak akan berhasil dengan baik bila berbagai kendala di atas, terutama yang terkait dengan faktor guru, belum diatasi lebih dahulu.

Pengenalan kecakapan hidup terhadap peserta didik bukanlah untuk mengganti kurikulum yang ada, akan tetapi untuk melakukan reorientasi terhadap kurikulum yang ada agar benar-benar dapat merefleksikan nilai-nilai kehidupan nyata. Jadi pendidikan kecakapan hidup merupakan upaya untuk menjembatani kesenjangan antara kurikulum yang ada terhadap tuntutan kehidupan nyata.

Keberhasilan implementasi pendidikan kecakapan hidup tidak hanya bergantung pada model yang digunakan, namun juga sangat bergantung pada terpenuhi tidaknya syarat-syarat minimal yang harus diupayakan untuk masing-masing model. Model-model implementasi di atas sifatnya adalah kondisional, oleh sebab itu pihak sekolah perlu memilih dan menggunakannya secara hati-hati sesuai dengan kondisi, kemampuan, dan keinginan sekolah beserta seluruh *stakeholder*-nya. Model manapun yang dipilih, implementasi pendidikan kecakapan hidup membutuhkan suatu reorientasi kurikulum, pembelajaran, dan penilaian (Saryono, Djoko, 2002). Selain itu juga memerlukan reformasi manajemen sekolah, budaya sekolah, dan peningkatan hubungan sekolah dengan masyarakat.

## E. Kesimpulan

1. Perlunya peningkatan sosialisasi *life skills* pada keluarga, masyarakat dan pemerintah.
2. Implementasi *life skills* di sekolah dapat dimasukkan dalam mata pelajaran muatan loka, sehingga tidak menambah beban bagi guru dan sekolah.
3. *Life skills* dalam pengembangan kurikulum lebih merefleksikan kehidupan nyata, penyelenggaraanya benar-benar memiliki penguasaan kehidupan yang kuat, siswa aktif dan mempelajari kenyataan, metode pembelajaran lebih konkrit, kerja tim kuat, media pendidikan menggunakan kenyataan, tempat belajar tidak harus di kelas, pembelajaran tergantung kompetensi yang ingin dikuasai, pengalaman hidup lebih nyata dan evaluasi belajar lebih menekankan pada kenyataan.
4. Implementasi pendidikan kecakapan hidup harus ditangani secara hati-hati, serius, dan cermat. Kesalahan dalam penanganan hanya akan memunculkan masalah baru dalam pendidikan . Sebaliknya penanganan yang benar akan membuat sebagian besar permasalahan pendidikan sekaligus permasalahan sosial-ekonomi masyarakat dapat diatasi. Ini berarti keberhasilan atau kegagalannya sangat bergantung pada para pelaku pendidikan itu sendiri, pakar-pakar pendidikan, birokrat, dan semua *stakeholder* pendidikan.

## F. Daftar Pustaka

- Bambang Sartono. 2003. Pengenalan Pelatihan Kewirausahaan Dalam Rangka Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup, **Semiloka Pengembangan Model Pembelajaran** , Lembaga Penelitian UNY, 13 Agustus 2003.
- Brolin, D.E. 1989. **Life Centered Career Education: A Competency Based Approach**. Reston VA: The Council for Exepctional Children.
- . 2002. **Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Kecakapan Hidup. Buku I, II, dan III**. Jakarta: Depdiknas.
- . 2003. **Panduan Pembelajaran Berorientasi Pada Kecakapan Hidup**. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Proyek Pengembangan Pendidikan Berorientasi Keterampilan Hidup. Depdiknas, Jakarta.
- . 2004. **Pedoman Penyelenggaraan Program Kecakapan Hidup (Life Skills) Pendidikan Non Formal**. Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda. Depdiknas.

- Dinas Pendidikan Jawa Barat. 2002. **Pendidikan Berbasis Luas Kecakapan Hidup dengan Model Pelaksanaan Pembelajaran Hidup di Sekolah**. Bandung: CV Dwi Rama.
- Indrajati Sidi. 2002. **Konsep Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (Life Skill) melalui Pendidikan Berbasis Luas (Broad-Based Education-BBE)**, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.
- Kendall, John S dan Marzano, Robert J. 1997. **Content Knowledge: A Compendium of Standards and Benchmarks for K-12 Education**. Aurora, Colorado, USA: McREL Mid – Continent Regional Educational Laboratory; Alexandria, Virginia, USA: ASCD.
- Parjono. 2002. **Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills)**. WUNI, Edisi Mei 2002. LPM Universitas Negeri Yogyakarta.
- Saryono, Djoko. 2002. Pendidikan Kecakapan Hidup: Konsepsi dan Implementasinya di Sekolah. **Makalah dalam Workshop Pengembangan Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah Berorientasi Kecakapan Hidup di Jawa Timur**, 11 November 2002, Universitas Negeri Malang.
- Slamet PH. 2002. **Pendidikan Kecakapan Hidup: Konsep dasar**.

***Kelompok bidang Kajian D***

Pengirim: Marwanti,  
Jurusan PKK Fakultas Teknik  
Universitas Negeri Yogyakarta.  
Telp Kantor (0274) 586168 Psw 278  
Rumah (0274) 586340  
Hp: 08122765767